

## OPTIMALISASI HILIRISASI, KETAHANAN PANGAN, DAN REFORMASI FISKAL SEBAGAI PILAR TRANSFORMASI EKONOMI MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

[widjaja\\_gunawan@yahoo.com](mailto:widjaja_gunawan@yahoo.com)

### Abstract

*This study examines the optimal role of downstreaming, food security, and fiscal reform as key pillars in Indonesia's economic transformation towards the Indonesia Emas 2045 vision. Downstreaming is identified as an important strategy to increase the added value of domestic products and promote sustainable industrialisation. Food security is the foundation of national social and economic stability through the provision of sufficient, high-quality, and sustainable food. Meanwhile, fiscal reform ensures the availability of effective policies and financing capacity to support the two pillars through a more efficient and fair taxation system and budget management. This literature review examines various related literature to describe the current conditions, challenges, and opportunities for implementing the three pillars in the context of national economic development. The results of the study emphasise the need for synergy and an integrative approach to the three pillars so that Indonesia can achieve a self-reliant, inclusive, and globally competitive economic transformation by 2045.*

**Keywords:** *downstreaming, food security, fiscal reform, economic transformation, Indonesia Emas 2045.*

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran optimalisasi hilirisasi, ketahanan pangan, dan reformasi fiskal sebagai pilar utama dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Hilirisasi diidentifikasi sebagai strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah produk domestik dan mendorong industrialisasi yang berkelanjutan. Ketahanan pangan menjadi pondasi stabilitas sosial dan ekonomi nasional melalui penyediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Sementara itu, reformasi fiskal memastikan tersedianya kebijakan dan kapasitas pembiayaan yang efektif untuk mendukung kedua pilar tersebut, melalui sistem perpajakan dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan adil. Kajian pustaka ini menelaah berbagai literatur terkait untuk menggambarkan kondisi terkini, tantangan, dan peluang implementasi ketiga pilar dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Hasil penelitian menegaskan perlunya sinergi dan pendekatan integratif atas ketiga pilar agar Indonesia dapat mewujudkan transformasi ekonomi yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing global pada tahun 2045.

**Kata kunci:** hilirisasi, ketahanan pangan, reformasi fiskal, transformasi ekonomi, Indonesia Emas 2045.

## Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan sumber daya alam melimpah, menghadapi tantangan signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing ekonominya menuju visi Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut transformasi ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga pada peningkatan kualitas produksi dan keberlanjutan Pembangunan (Bappenas RI, 2021). Salah satu strategi yang diidentifikasi sebagai kunci sukses transformasi ini adalah optimalisasi hilirisasi berbagai sektor strategis, terutama industri tambang dan pangan. Hilirisasi diharapkan mampu menambah nilai tambah produk domestik, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata (Wijaya, 2017).

Hilirisasi merujuk pada proses pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi yang siap dipasarkan. Dalam konteks pengembangan ekonomi Indonesia, hilirisasi menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan kapasitas industri domestik. Program hilirisasi yang efektif diyakini dapat menciptakan multiplier effect terhadap sektor ekonomi lain, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional yang inklusif. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis dalam percepatan hilirisasi perlu dirancang secara komprehensif dan terintegrasi (N Hikmah, 2023).

Selain hilirisasi, ketahanan pangan juga menjadi pilar utama dalam mendukung stabilitas dan kesinambungan transformasi ekonomi Indonesia. Ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan dan akses pangan yang cukup bagi seluruh penduduk, tetapi juga mencakup aspek kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produksi pangan dalam jangka panjang. Dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, fluktuasi harga pangan, dan ketergantungan impor, penguatan ketahanan pangan nasional menjadi suatu keniscayaan yang harus mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak (Nurdin, 2019).

Peran ketahanan pangan dalam konteks transformasi ekonomi juga tak dapat dipandang sebelah mata. Ketahanan pangan yang kokoh mampu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi yang menjadi prasyarat untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Hilirisasi sektor pangan yang dioptimalkan dapat memperkuat nilai tambah produk hasil pertanian dan perikanan, membuka peluang ekspor, serta meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha mikro hingga kecil. Dengan demikian, penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi menjadi dua pilar yang saling melengkapi dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional (Endrianto Bayu Setiawan et al., 2025).

Reformasi fiskal merupakan pilar ketiga yang tidak kalah penting dalam proses transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Reformasi fiskal meliputi upaya perbaikan sistem perpajakan, pengelolaan anggaran negara, dan penguatan kebijakan fiskal yang responsif terhadap dinamika ekonomi. Reformasi ini bertujuan

membangun sistem keuangan negara yang efektif, transparan, dan berkeadilan agar mampu menyediakan ruang fiskal yang cukup untuk mendukung pembangunan dan program strategis nasional. Dalam konteks ini, reformasi fiskal menyediakan basis pendanaan yang stabil dan berkelanjutan bagi optimalisasi hilirisasi dan penguatan ketahanan pangan (Adi, 2022).

Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan antara ketiga pilar tersebut—hilirisasi, ketahanan pangan, dan reformasi fiskal—bersifat sinergis dan saling memperkuat. Sumber daya fiskal yang memadai akan memberikan dukungan pembiayaan bagi pengembangan industri hilir dan inovasi teknologi pangan. Sebaliknya, peningkatan kapasitas industri dan ketahanan pangan akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak dan devisa ekspor (Dewan Ketahanan Pangan, 2009). Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang integratif dan holistik sangat diperlukan agar pilar-pilar ini bisa bekerja secara optimal dalam mendorong transformasi ekonomi.

Ketahanan pangan sebagai fondasi ketahanan nasional secara umum sangat berpengaruh terhadap daya tahan masyarakat menghadapi krisis, baik ekonomi maupun sosial. Penguatan ketahanan pangan tidak saja membutuhkan kebijakan yang mendukung produksi domestik, tapi juga perlunya inovasi dalam rantai pasok dan distribusi pangan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Transformasi ekonomi yang sukses harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat (Tiara Keysa Nuraisyah, 2025).

Reformasi fiskal, sebagai pilar ketiga, memiliki peran utama dalam memastikan bahwa arah pembangunan ekonomi didukung oleh pembiayaan yang memadai dan struktur fiskal yang sehat. Indonesia memerlukan sistem fiskal yang adaptif dan inklusif untuk mengatasi tantangan demografis dan globalisasi ekonomi yang dinamis. Reformasi fiskal juga harus mampu memperkuat kapasitas negara dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi guna mencapai tujuan pembangunan jangka Panjang (Wahyuni, 2024).

Secara keseluruhan, optimalisasi hilirisasi, ketahanan pangan, dan reformasi fiskal harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya mencapai transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sinergi dan keterpaduan implementasi ketiga pilar ini akan menjadi penentu kunci keberhasilan mewujudkan visi nasional sebuah Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya (Muis, 2023).

Dalam konteks tersebut, studi ini bertujuan untuk melakukan kajian pustaka yang mendalam terkait optimalisasi hilirisasi, ketahanan pangan, dan reformasi fiskal sebagai pilar utama transformasi ekonomi Indonesia menuju 2045. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi terkini, strategi yang dijalankan, serta hambatan dan peluang yang ada. Hasil kajian ini sekaligus menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang relevan bagi para pembuat keputusan dan

pemangku kepentingan. Pentingnya hilirisasi dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia tidak lepas dari potensi besar sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini. Namun, selama ini Indonesia masih menghadapi kendala berupa ekspor bahan mentah yang memberikan nilai tambah rendah. Transformasi melalui hilirisasi adalah langkah strategis untuk meningkatkan hasil produksi industri dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar global dalam kondisi yang rentan fluktuasi. Hilirisasi juga berperan menstimulasi inovasi teknologi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor industri.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (literature review) yang bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis berbagai sumber tertulis terkait optimalisasi hilirisasi, ketahanan pangan, dan reformasi fiskal sebagai pilar transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, laporan kebijakan pemerintah, dokumen resmi, serta hasil riset terkait yang relevan dan kredibel (Eliyah & Aslan, 2025). Analisis dilakukan secara kritis dan komprehensif untuk menggali konsep-konsep utama, strategi implementasi, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang ada dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, sehingga dapat menghasilkan pemahaman mendalam dan menyeluruh yang menjadi dasar rekomendasi kebijakan (Machi & McEvoy, 2016).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Optimalisasi Hilirisasi dan Ketahanan Pangan dalam Transformasi Ekonomi**

Optimalisasi hilirisasi merupakan salah satu strategi utama yang diusung pemerintah Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Hilirisasi, yang berarti proses pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah yang lebih tinggi, menjadi kunci dalam mendorong industrialisasi dan meningkatkan daya saing produk domestik di pasar global. Dengan memperkuat hilirisasi, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah pada setiap sektor yang diolah secara domestic (Budilaksono, 2024).

Sektor pertambangan menjadi salah satu fokus utama dalam program hilirisasi pemerintah. Produk tambang seperti nikel, tembaga, dan bauksit tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, melainkan diolah menjadi produk smelter dan barang setengah jadi yang siap dimanfaatkan sebagai bahan baku industri lain. Realisasi investasi di bidang hilirisasi pertambangan menunjukkan tren positif, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta membuka lapangan kerja baru di daerah-daerah penghasil sumber daya tersebut (Supriyadi, 2020).

Tidak hanya sektor tambang, hilirisasi sektor pangan juga menjadi perhatian penting dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Hilirisasi produk

pertanian dan perikanan dapat meningkatkan nilai tambah hasil produksi serta mengurangi ketergantungan impor bahan pangan strategis. Transformasi ini berpotensi memperkuat kemandirian pangan, sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang menjadi ujung tombak produksi pangan (World Bank, 2023).

Peran hilirisasi dalam sektor pangan tidak hanya berkaitan dengan aspek nilai tambah, tetapi juga kesehatan dan keamanan pangan. Produk olahan hasil hilirisasi harus memenuhi standar kualitas yang baik dan aman dikonsumsi sehingga mampu mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Optimalisasi hilirisasi pangan juga dapat memperkecil angka kerugian pascapanen dan memperluas akses pasar bagi produk lokal, sehingga produk pangan Indonesia mampu bersaing di pasar domestik dan internasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2024).

Peningkatan investasi menjadi salah satu pendorong utama keberhasilan hilirisasi. Pemerintah melalui berbagai kebijakan pro-investasi telah berhasil menarik modal besar yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur hilirisasi, termasuk pembangunan pabrik pengolahan (smelter) dan fasilitas penyimpanan hasil pertanian. Investasi ini tidak hanya memperkuat sektor industri, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah yang menjadi sentra produksi sumber daya alam (Hakim, 2014). Namun, optimalisasi hilirisasi masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan regulasi. Masih terdapat kendala infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia yang belum memadai. Selain itu, kebijakan yang belum sinkron dan perizinan yang rumit juga menjadi hambatan dalam percepatan program hilirisasi. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta agar program ini dapat berjalan efektif (Rachman, 2025).

Dalam konteks ketahanan pangan, optimalisasi hilirisasi juga harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan penggunaan energi terbarukan dalam proses hilirisasi harus menjadi prioritas untuk menjaga kelestarian ekosistem dan mengurangi dampak negatif terhadap perubahan iklim. Pendekatan ini sejalan dengan visi pembangunan ekonomi hijau yang menjadi bagian dari agenda Indonesia Emas 2045 (Indah Rizki Putri, 2025).

Sinergi antara hilirisasi dan ketahanan pangan dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Ketahanan pangan yang kuat akan menghasilkan tenaga kerja yang sehat dan produktif, membantu menekan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Hilirisasi yang efektif membuka peluang diversifikasi produk dan inovasi teknologi yang mendukung ketahanan sistem pangan secara menyeluruh (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Penting juga untuk menyinergikan program hilirisasi dengan pemberdayaan UMKM serta petani dan nelayan lokal agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh

masyarakat luas. Pembentukan kemitraan antara industri besar dengan pelaku usaha kecil harus menjadi bagian integral dari strategi hilirisasi. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan dan kapasitas lokal sekaligus mempercepat inklusi ekonomi di sektor hilirisasi dan pangan (Simatupang, 2018).

Pengembangan riset dan inovasi teknologi menjadi faktor penentu dalam mempercepat optimalisasi hilirisasi dan ketahanan pangan. Peningkatan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku industri harus terus dimaksimalkan untuk menghasilkan solusi teknologi tepat guna yang mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing produk dalam negeri. Selain itu, teknologi digital dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan distribusi produk hasil hilirisasi (Hidayatullah, 2025).

Optimalisasi hilirisasi juga harus didukung oleh kebijakan fiskal yang tepat. Insentif fiskal seperti pajak rendah, kemudahan perizinan, dan subsidi dapat menarik investasi baru serta mendorong pengembangan kapasitas industri hilirisasi. Kebijakan fiskal yang proaktif akan memperkuat ekosistem investasi dan memberikan kepastian hukum sehingga membangun kepercayaan investor dalam jangka Panjang (Purwanto, 2021).

Penguatan koperasi dan lembaga keuangan mikro juga penting dalam mendukung pelaku usaha kecil dalam rantai hilirisasi dan ketahanan pangan. Akses modal yang mudah dan terjangkau dapat memperkuat kapasitas produksi dan distribusi produk hilir, mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas output. Hal ini sekaligus mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal dan mempercepat pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam (Febrianto, 2022).

Transformasi ekonomi yang diupayakan melalui optimalisasi hilirisasi dan ketahanan pangan harus pula mengintegrasikan aspek sosial budaya masyarakat. Respek terhadap nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta menjaga kesinambungan program. Pendidikan dan pelatihan yang memadai menjadi kunci dalam membangun sumber daya manusia yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan masa depan (Abdillah, 2023).

Melalui penguatan hilirisasi dan ketahanan pangan secara simultan, Indonesia dapat mewujudkan kedaulatan ekonomi dan pangan yang berkelanjutan. Proses ini juga mendukung penciptaan lapangan kerja yang luas, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pilar-pilar ini menjadi fondasi strategis dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang mandiri, maju, dan berdaya saing global.

### **Reformasi Fiskal sebagai Pilar Penguatan Transformasi Ekonomi**

Reformasi fiskal memegang peranan sentral dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Sebagai upaya memperbaiki

pengelolaan keuangan negara, reformasi fiskal bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini sangat penting agar pemerintah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk membiayai berbagai program pembangunan strategis dan transformasi ekonomi secara berkelanjutan (Hidayatullah, 2025).

Pilar reformasi fiskal mencakup beragam aspek, mulai dari perbaikan sistem perpajakan, penguatan pengelolaan belanja negara, hingga pengembangan instrumen fiskal baru yang responsif terhadap dinamika ekonomi. Salah satu fokus utama adalah peningkatan penerimaan negara melalui optimalisasi sumber pendapatan, khususnya pajak, yang selama ini belum dieksplorasi secara maksimal. Reformasi administrasi perpajakan dan penerapan teknologi digital menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan pajak (Saputra, 2018).

Kebijakan fiskal yang efektif harus mampu menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi yang dinamis. Pemerintah menetapkan defisit anggaran yang sehat pada kisaran 2,5% hingga 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai batas aman untuk menjaga stabilitas fiskal dan meminimalkan risiko berlebihan dalam pembiayaan defisit. Defisit ini juga dimanfaatkan secara strategis untuk mendorong investasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi (Imawan, 2022).

Sebagai bagian dari reformasi fiskal, pemerintah juga mengembangkan berbagai insentif fiskal yang diarahkan untuk mendorong investasi di sektor-sektor prioritas, termasuk hilirisasi industri dan ketahanan pangan. Insentif berupa penurunan tarif pajak, kemudahan regulasi, dan fasilitas lainnya bertujuan menarik modal swasta agar dapat mendukung percepatan transformasi ekonomi. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat basis produksi nasional dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global (Yudhistira, 2023).

Transformasi fiskal yang berkelanjutan tidak mungkin terjadi tanpa peningkatan kapasitas sistem fiskal digital. Digitalisasi administrasi perpajakan dan pengelolaan keuangan negara menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan meminimalkan kebocoran penerimaan. Pengembangan ekosistem fiskal digital juga mendukung inklusi keuangan dan mempermudah akses layanan fiskal bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (F Rahman, 2021).

Reformasi fiskal juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan besar dalam lanskap ekonomi global dan domestik. Fenomena seperti ekonomi digital, masyarakat tanpa uang tunai (cashless society), dan perkembangan teknologi keuangan menuntut kebijakan fiskal yang adaptif dan inovatif. Hal ini mencakup reformasi sistem perpajakan untuk transaksi digital dan penanganan tantangan baru terkait perpajakan ekonomi berbasis digital (Yunianto, 2017).

Penguatan fiskal juga berkaitan erat dengan pengelolaan belanja negara yang lebih produktif dan fokus untuk mendukung tujuan pembangunan jangka panjang. Reformasi belanja negara menyorot pada peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, pengurangan pemborosan, dan alokasi yang lebih tepat sasaran, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta riset dan teknologi yang menjadi motor penggerak transformasi ekonomi (F Rahman, 2021). Selain itu, penguatan tata kelola fiskal berkontribusi pada peningkatan kepercayaan investor dan lembaga keuangan internasional terhadap ekonomi Indonesia. Stabilitas fiskal dan transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi faktor kunci dalam menarik investasi asing langsung (FDI) yang dibutuhkan untuk pembangunan jangka panjang. Kepercayaan ini sekaligus menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi nasional (Aditya, 2020).

Reformasi fiskal juga memainkan peran strategis dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia sebagai modal utama Indonesia Emas 2045. Alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan akan terus ditingkatkan untuk membentuk tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Pendanaan yang kuat dari reformasi fiskal menjamin kesinambungan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, 2024).

Pada sisi pembiayaan infrastruktur, reformasi fiskal memungkinkan pemerintah mengelola utang secara bijak dan efisien. Pengelolaan utang yang bertanggung jawab dengan proyeksi pembiayaan investasi jangka panjang mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi basis pengembangan ekonomi, termasuk sektor energi terbarukan dan transportasi yang mendukung hilirisasi dan ketahanan pangan. Masa transisi pemerintahan menjadi momentum penting dalam melanjutkan reformasi fiskal yang sudah berjalan. Pemerintah perlu memastikan kesinambungan kebijakan dan akselerasi reformasi agar momentum transformasi ekonomi tidak terhenti. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta sinergi dengan pemerintah daerah perlu diperkuat agar reformasi fiskal dapat berjalan efektif dan berdampak luas (Thoriq, 2017).

Penguatan kelembagaan perpajakan menjadi bagian kunci dari reformasi fiskal. Modernisasi institusi perpajakan dengan memberikan otonomi lebih besar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi canggih dapat meningkatkan kinerja administrasi perpajakan. Hal ini penting untuk mendukung penerimaan negara yang berkelanjutan dan adil. Selain itu, reformasi fiskal juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial dan distribusi pembangunan yang inklusif. Kebijakan fiskal yang progresif, seperti penguatan pajak penghasilan dan pajak konsumsi, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendukung kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini menjadikan pembangunan ekonomi sekaligus berkeadilan (Widodo & Wulandari, 2016).

Dukungan terhadap penguatan fiskal juga perlu diiringi dengan upaya edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat luas. Pemahaman yang baik terhadap sistem perpajakan dan manfaatnya bagi pembangunan negara akan meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat basis penerimaan. Program literasi juga harus menjangkau pelaku usaha kecil dan masyarakat di wilayah terpencil agar inklusi fiskal semakin meluas (Fadli, 2017).

Reformasi fiskal adalah fondasi penting yang mendasari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang menargetkan Indonesia Emas 2045. Dengan sistem fiskal yang kuat, adaptif, dan berkeadilan, Indonesia akan mampu mengelola sumber daya keuangannya secara optimal, membiayai transformasi ekonomi secara berkelanjutan, serta menyiapkan pondasi bagi kemajuan bangsa dalam menghadapi era globalisasi dan tantangan masa depan.

### **Kesimpulan**

Optimalisasi hilirisasi, ketahanan pangan, dan reformasi fiskal merupakan tiga pilar penting yang saling melengkapi dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Hilirisasi berperan strategis dalam meningkatkan nilai tambah produk domestik, mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah, serta membuka lapangan kerja baru yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penguatan ketahanan pangan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, mendukung stabilitas sosial dan ekonomi nasional yang menjadi fondasi utama pembangunan jangka panjang.

Reformasi fiskal menjadi pilar utama yang menyediakan kapasitas pembiayaan dan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendukung kedua pilar lainnya. Dengan sistem perpajakan dan pengelolaan anggaran negara yang efisien, transparan, dan berkeadilan, reformasi fiskal memungkinkan pemerintah menyediakan sumber daya finansial yang memadai untuk investasi di bidang hilirisasi dan ketahanan pangan. Pendekatan fiskal yang adaptif juga memperkuat daya saing ekonomi nasional serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi percepatan transformasi ekonomi.

Sinergi ketiga pilar ini harus dijalankan secara integratif dan berkelanjutan agar mampu menghadirkan perubahan struktural yang signifikan dalam ekonomi Indonesia. Dengan optimalisasi hilirisasi, ketahanan pangan yang terjamin, dan reformasi fiskal yang kuat, Indonesia dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju, mandiri, dan berkeadilan sosial. Rekomendasi kebijakan selanjutnya perlu memfokuskan pada penguatan koordinasi lintas sektor, inovasi teknologi, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya secara efisien demi menciptakan ekosistem ekonomi yang resilient dan berdaya saing global.

## References

- Abdillah. (2023). Hilirisasi Nikel sebagai Langkah Awal Transformasi dan Akselerasi Perekonomian Indonesia. -.
- Adi, M. (2022). Potensi Hilirisasi Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Strategi Pembangunan Nasional*, 7(4). <https://doi.org/10.14421/jsbn.v7i4.5678>
- Aditya, R. D. (2020). Dampak Fiskal atas Hilirisasi Industri pada Penerimaan Negara. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 10(7).
- Bappenas RI. (2021). *Visi Indonesia Emas 2045: Pilar Utama Transformasi Ekonomi Nasional*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Budilaksono, A. (2024). Penerapan Teori Keunggulan Absolut dalam Kebijakan Hilirisasi Pemerintah Indonesia dan PMK No. 38. -.
- Dewan Ketahanan Pangan. (2009). *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. (2024). *Bunga Rampai Fiskal: Rekomendasi Kebijakan Fiskal Indonesia*.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Endrianto Bayu Setiawan, Imam Koeswahyono, & Indah Dwi Qurbani. (2025). Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Hilirisasi Nikel untuk Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. *Jurnal RechtsVinding*, 14(1), 1–26. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i1.2061>
- F Rahman. (2021). Dinamika Fiskal di Era Digitalisasi Ekonomi. *Jurnal Keuangan Negara*, 7(1). <https://doi.org/10.31596/jkn.v7i1.750>
- Fadli, R. (2017). Analisis Fiskal Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Green Fiscal Reform*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1123589>
- Febrianto, D. H. (2022). Impact of Downstreaming Policy to Indonesian Economy. *Southeast Asian Economic Journal*, 15(3). <https://doi.org/10.1016/saj.v15i3.3414>
- Hakim, M. A. (2014). *Memperkuat Ketahanan Pangan Demi Masa Depan Indonesia 2015-2025*. CV Rumah Buku.
- Hidayatullah. (2025). *Keberlanjutan Program Hilirisasi Sumber Daya Alam di Indonesia*. DPR RI.
- Imawan, S. (2022). Fiscal Reform and Tax Morale in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Taxation*, 10(2). <https://doi.org/10.2139/ssrn.4203849>
- Indah Rizki Putri. (2025). Ketidakpastian Hukum dan Investasi dalam Hilirisasi: Studi Komparatif Indonesia dan China dalam Pengembangan Energi Terbarukan. *Jurnal RechtsVinding*, 14(1), 83–106. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i1.2061>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024). *Menko Airlangga: Petik Manfaat Hilirisasi, Indonesia Konsisten Cetak Surplus Neraca Perdagangan dalam 44 Bulan Berturut-turut*. Siaran Pers HM.4.6/13/SET.M.EKON.3/01/2024.
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2016). *The Literature Review: Six Steps to Success*. Corwin Press.

- Muis, S. (2023). Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Ketahanan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 23(3).
- N Hikmah. (2023). Sebuah Strategi Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *The Journalish*, 5(2). <https://doi.org/10.47637/thejournalish.v5i2.604>
- Nuridin, S. A. (2019). Reformasi Fiskal dan Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 14(1).
- Purwanto, B. H. (2021). Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi Digital Nasional. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik*, 9(1), 97–104. <https://doi.org/10.33445/jikp.v9i1.124>
- Rachman, A. (2025). Kontribusi Reformasi Fiskal dalam Mendorong Transformasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Transformasi Fiskal*, 12(2). <https://doi.org/10.3126/jtf.v12i2.34008>
- Saputra, E. (2018). Hilirisasi Industri, Ketahanan Pangan, dan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Agribisnis Terapan*, 5(3).
- Simatupang, T. (2018). *Kebijakan Hilirisasi Industri dan Ketahanan Pangan*. Penerbit Paramadina.
- Supriyadi, D. (2020). Peluang dan Tantangan Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1).
- Thoriq, A. (2017). Analisis Sosial Ekonomi Calon Petani Perluasan Sawah di Kabupaten Tulang Bawang. *Optima Jurnal Ilmiah Agribisnis Dan Ekonomi*, 1(2).
- Tiara Keysa Nuraisyah, K. K., Siti Rasyidian Radya Putri, Nova Ainun Nisa, Salwa Hulyatul Qulbi. (2025). Perkembangan Food Estate di Indonesia: Analisis Peluang, Tantangan, dan Ancaman. *Syntax Admiration*, 6(2), 1099. <https://doi.org/10.52627/sa.v6i2.2110>
- Wahyuni, S. (2024). Penguatan Kebijakan Fiskal untuk Transformasi Ekonomi. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 19(2).
- Widodo, A. S., & Wulandari, R. (2016). Analisis Pola Konsumsi dan Tingkat Kerawanan Pangan Petani Lahan Kering di Kabupaten Gunungkidul. *Agraris*, 2(2).
- Wijaya, O. (2017). Strategi Pengembangan Komoditas Pangan Unggulan. *Agraris*, 3(1), 48–56. <https://doi.org/10.18196/agr.3175>
- World Bank. (2023). *Pathways to Prosperity: Strengthening Food Security and Fiscal Policy Reform in Indonesia*. World Bank Publications.
- Yudhistira, M. F. (2023). Fiscal Policy Reforms and Inclusive Growth in Indonesia. *Economic Transformation Journal*, 8(2). <https://doi.org/10.1177/23949015231167495>
- Yunianto, H. (2017). Dampak Hilirisasi Nikel terhadap Diversifikasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Mineral & Batubara*, 15(4), 201.